

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 668–682. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19927.2018>
- Asmarani, N. G. C. (2020). Per 1 April 2020, NPWP Bendahara Pemerintah Dihapus. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/per-1-april-2020-npwp-bendahara-pemerintah-dihapus-18674>
- Banowati, A. E. (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 4 Ayat (2) Oleh Bendahara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun Pajak 2019*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi COVID-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.821>
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2021). *Profil Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021*.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581>
- Intan, P. K. (2016). *Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko*. Universitas Andalas.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Data Vaksinasi COVID-19*. <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-COVID-19-update-31-desember-2021>

PMK Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN Atau APBD, (2010).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, (2016).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi I, (2019).

Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 di Atas Rata-Rata Negara di Asia Tenggara. (2021). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2020-di-atas-rata-rata-negara-di-asia-tenggara/#:~:text=“Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun,Kamis \(15%2F07\).](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2020-di-atas-rata-rata-negara-di-asia-tenggara/#:~:text=“Indonesia%20mengalami%20kontraksi%20ekonomi%20tahun,Kamis%20(15%2F07).”)

APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif Dalam Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2022). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-COVID-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>

Kristi, A. M. (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 Oleh Instansi Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Klepu)*. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV Andi Offset.

Masdi, A. (2021). Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. *Kemenkeu.Go.Id*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>

Maulana, N. (2015). *Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil, (1977).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 Tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan PP Nomor 15 Tahun 1985, (1992).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, (2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2005).

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural, (2007).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).

Pengumuman Nomor: PENG-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak, (2010).

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, (2012).

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, (2012).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, (2018).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, (2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, (2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).
- Roni, C. C. (2021). *Penerapan Kebijakan With Holding Tax System Terhadap Jasa Pemasangan Reklame di Bapenda Kota Palopo*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sari, T. M. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Universitas Negeri Semarang.
- Setiawan, D. A. (2021). Di Kanwil Ini, Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak 101%. *DDTCNews*. Di Kanwil Ini, Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak 101%25 (ddtc.co.id)
- Siti, N. (2019). *Perhitungan , Pemotongan , Pencatatan , Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Puskesmas SKJ (Studi Kasus pada Puskesmas SKJ)*. 16752056.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Tansuria, B. I. (2012). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final. *Journal of Business and Economics*, 11 Nomor 2, 106–120. <http://ejournal.unklab.ac.id/index.php/jbe/article/view/54>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.